



LAPORAN KINERJA STASIUN PSDKP PONTIANAK TAHUN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 20 Januari 2026
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Si

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 9 Sasaran Strategis (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif ; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Pada Triwulan IV atau tahun 2025 berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Pontianak mengampu sebanyak 8 sasaran strategis kinerja dan sebanyak 21 indikator kinerja terdiri dari IKU dan IKM yang mana capaian sebesar **106,47%** dengan kategori '**Baik**'. Dari 21 indikator kinerja tersebut 20 diantaranya telah mencapai dari target yang ditentukan dan 1 indikator kinerja tidak mencapai target yaitu indikator kinerja Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian **75,55** dari target **77**. Untuk mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 35.964.014.000**, Sepanjang tahun 2025 DIPA Stasiun PSDKP Pontianak mengalami revisi dampak efisiensi anggaran sehingga menjadi Rp. **33,094,067,000**. Sampai dengan 31 Desember tahun 2025

berdasarkan OM-SPAN Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar **92,13%** atau sebesar **Rp. 30.490.283.123**. Nilai efisiensi dari 8 sasaran strategis tahun 2025 sebesar **23,14%**. Dengan demikian secara umum indikator kinerja telah tercapai secara optimal kemudian selanjutnya untuk dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak.....	5
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029.....	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
1. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	20
2. Indeks Operasi Kapal Pengawas.....	23
3. Indeks Operasi Speed Boat Pengawas	27
4. Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP ..	31
5. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	33
6. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	37
7. Nilai kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	40
8. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	44
9. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	50
10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	53
11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	56
12. Nilai Kinerja Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	60
13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak	63
14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak.....	66
15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak.....	69
16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	71

17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	73
18. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	75
19. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	79
20. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	81
21. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	83
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis	86
3.4. Akuntabilitas Keuangan	87
BAB 4 PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Rekomendasi	89
BAB 5. LAMPIRAN	90
5.1. PK Awal	90
5.2. PK Revisi	94
5.3. Penghargaan Yang Diterima Unit Kerja	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia	6
Tabel 2. Matrik Perubahan Target Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025	16
Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas.....	22
Tabel 6. Perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2025	24
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas.	25
Tabel 8. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2025.....	28
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indeks operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	29
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak 5 Tahun Terakhir.....	32
Tabel 11. Kegiatan Operasi Intelijen SDK Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025.....	35
Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	36
Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	39
Tabel 14. Capaian Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025	41
Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	42
Tabel 16. Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha.....	40
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	46
Tabel 18. Rekapitulasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Bidang Perikanan	47
Tabel 19. Rekapitulasi Penerbitan HPK-SLO Ilingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025	47
Tabel 20. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	52
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	52

Tabel 22. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	55
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	55
Tabel 24. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	58
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	59
Tabel 26. Capaian NKPA Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2025.....	62
Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	63
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak 5 tahun Terakhir	65
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	68
Tabel 30. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025	69
Tabel 31. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025	70
Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	70
Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	72
Tabel 34. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	73
Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.....	74
Tabel 36. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	75
Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian tiap tahunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	77
Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80
Tabel 39. Capaian Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	81
Tabel 40. Capaian Perbandingan Target dan Capaian Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak.....	82

Tabel 41. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	84
Tabel 42. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis triwulan IV tahun 2025.....	87
Tabel 43. Rincian Realisasi Anggaran	87
Tabel 44. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak	5
Gambar 2. Wilayah Kerja	8
Gambar 3. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025	18
Gambar 4. Kegiatan Operasi Kapal Pengawas	26
Gambar 5. Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas	30
Gambar 6. Kegiatan Pereliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan	33
Gambar 7. Kegiatan Operasi Intelijen Sektor Kelautan	33
Gambar 8. Kegiatan Pengawasan Sektor Kelautan	42
Gambar 9. Kegiatan Pengawasan Sektor Perikanan	42
Gambar 10. Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan ..	53
Gambar 10. Kegiatan Peyelelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	59
Gambar 12. Capaian IKPA tahun 2025	57
Gambar 13. Tangkapan layar Sisusan capaian IKM Pelayanan Publik	78

1.1. Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: ⁽¹⁾ Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾ Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾ Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾ Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; ⁽⁵⁾ Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; ⁽⁶⁾ Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta ⁽⁷⁾ Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP no. 35 tahun 2023 tentang pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan KKP.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun

PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3. Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Stasiun PSDKP Pontianak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.

- 2) Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadi elemen penting dalam membantu kegiatan pengawasan.

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a) Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b) Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBPN jadi berkurang.
- c) Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
- d) Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e) Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f) Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

3. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a) Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b) Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c) Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha

5. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.

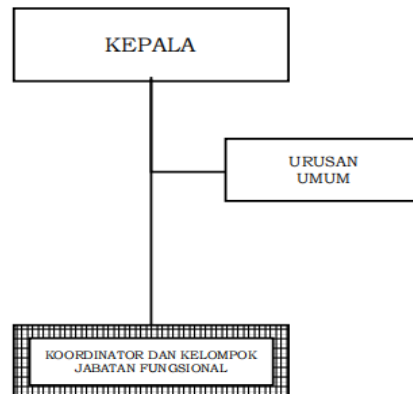
7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKKPR.

1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SDM Pengawasan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 total adalah 133 orang yang tersebar di UPT, Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 133 orang terdapat 120 orang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 13 orang non ASN. Dari 120 orang dalam menunjang kinerja teknis pengawasan diantaranya adalah 70 orang Pengawas Perikanan, 13 orang Polisi Khusus PWP3K dan 14 orang PPNS Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEP-DJPSPDKP/2023 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

NO	LOKASI	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	TOTAL
1	STASIUN PSDKP PONTIANAK	26	15	8	11	60
2	SATWAS SAMBAS	5	4	-	1	10
3	SATWAS KAYONG UTARA	4	1	-	-	5
4	SATWAS KOTAWARINGIN BARAT	2	1	-	1	4
5	WILKER SUNGAI RENGAS-KAKAP	2	5	-	-	7
6	WILKER MEMPAWAH	1	1	-	-	2
7	WILKER SINGKAWANG	1	1	-	-	2
8	WILKER SAJINGAN	1	1	-	-	2
9	WILKER JAGOI BABANG	-	1	-	-	1
10	WILKER ENTIKONG	1	3	-	-	4
11	WILKER SERUYAN	2	1	-	-	3
12	WILKER KETAPANG	3	1	-	-	4
13	WILKER KAPUAS HULU/BADAU	2	1	-	-	3
12	AKP HIU MACAN 01	10	2	-	-	12
13	AKP HIU 11	9	3	-	-	12
14	PPPK PENUGASAN DI KAPAL PENGAWAS LAIN	-	2	-	-	2
TOTAL		69	42	8	13	133

Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M²)

2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak Tahun 2025 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang $\pm 100\text{M}$ dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhoek.

d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M²

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

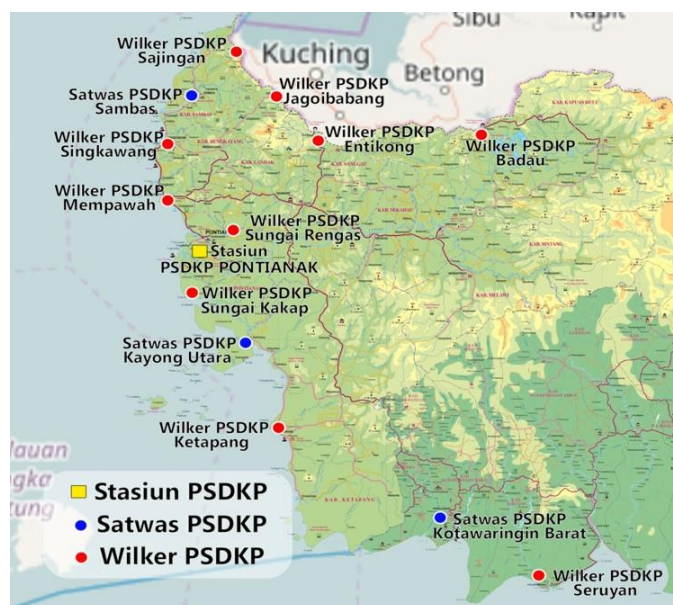
Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M²

Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 2/PERMEN-KP/2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 23 Februari 2024 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2025. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak sesuai Permen KP no 35 tahun 2023 tentang pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan KKP, memuat tentang Pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi pemerintah:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Evaluasi dan Analisis

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025.

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029, nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2025 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2025-2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 melalui pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon III) yang

menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2025. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2025 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

A. Pemantauan dan Operasional Armada;

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;

1. Penyelesaian perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
2. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
3. Penyelesaian Penanganan Barbuk
4. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

- C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
 - 1. Pelaku usaha yang berdampak pencemaran sumberdaya ikan
 - 2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 - 3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
 - 4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
 - 1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
 - 2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 - 3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
 - 4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
 - 5. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
 - 1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 - 2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 - 3. Layanan Perkantoran

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya ini tentunya merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak telah mengalami perubahan perjanjian kinerja yang terkait dengan Sasaran, indikator kinerja dan target yang ditentukan. Perubahan target indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 2. Matrik Perubahan Target Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025

Sebelum		Menjadi	
Sasaran /Indikator Kinerja	Target (%)	Sasaran /Indikator Kinerja	Target (%)
1. Sasaran Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan Indikator Kinerja Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100	1. Sasaran Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif Indikator Kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	100

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92
		4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP	100
SK3	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	81
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	81
SK8	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	71,5
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	95
		18	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	75
		20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	77
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	70

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

3.1. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 21 Indikator Kinerja pada tahun 2025 dan pada Triwulan IV atau tahun 2025 terdapat 21 indikator kinerja yang dihitung. Nilai Kinerja Organisasi S (NKO) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU (Indek Kenerja Utama) dan IKM (Indek Kinerja Manajerial) sebesar **106,47%**.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran Indikator Kinerja pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TRIWULAN IV 2025		
					TARGET	REALISASI	%
SK1	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82	82	82	100,00
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92	92	96,80	105,22
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92	92	93,00	101,09
		4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100
SK3	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100	100
		6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100	100
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	82	100	120
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	82	100	120
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	81	81	81	100
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	81	81	81,00	100
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	81	81	81	100
SK8	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	71,5	71,5	89,41	120
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	92	92	94,58	102,8
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	81	81	86,91	107,30
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	86	86	87,95	102,2
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	100
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	95	95	100	105,26

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TRIWULAN IV 2025		
			TARGET	REALISASI	%
	18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80	80	95,18	118,98
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75	75	92,50	120
	20 Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	77	77	75,55	98,12
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	70	70	77,25	110,3

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik (nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan IV Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya

Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Simswasmas) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Pembinaan Pokmaswas adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Adapun formula perhitungannya adalah

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **82** atau dengan persentase sebesar **100%** dengan kategori '**baik**'. Capaian ini mencapai nilai sesuai dari target yang ditentukan yaitu sebesar **82**. Pada tahun 2025 kegiatan pembinaan Pokmaswas tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan ini terdampak efisiensi. Sesuai kaidah perhitungan pada manual IKU revisi 15 Desember 2025 bahwa apabila kegiatan pembinaan Pokmaswas tidak dapat dilaksanakan karena faktor teknis atau anggaran maka capaian sesuai target

yang ditentukan. Untuk perencanaan telah dilakukan pada awal tahun 2025, untuk pendataan telah dilakukan Bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Rencana kegiatan pelaksanaan telah ditentukan yaitu 3 lokasi di Provinsi Kalimantan Barat dan 1 lokasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian IKU ini berdasarkan perhitungan yaitu sebesar **82**. Capaian ini telah mencapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2025 yaitu sebesar **82**. Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 ini apabila dibandingkan dengan tahun 2024 lebih kecil dimana pada tahun 2024 sebesar **100** atau dengan persentase sebesar **120%**. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2023. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **95**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kualiatas Pembinaan POKMASWAS	-	-	-	-	80	100	81	100	82	82	86	82
% Capaian	-		-		120		120		100		95	

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Sebesar **Rp. 400.000.000** sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 realisasi anggaran sebesar **0** atau **0%** dikarenakan adanya blokir anggaran akibat efisiensi anggaran maka nilai efisiensi dari sasaran strategis Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif belum dapat dihitung.

2. Indeks Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : (Bobot 50)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali)]: Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 45)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 3)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 2)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai. Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan IV tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 6. Perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2025

			Kriteria			Kriteria						Kriteria						Kriteria																				
			> 48 Hijau < 48 Merah			> 44 Hijau < 44 Merah						> 1 Hijau < 1 Merah						> 1 Hijau < 1																				
No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Intercept Target Operasi (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (3%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (2%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker	
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV					
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai			
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HU MACAN 01	246	258	73.41	11	21	57.27	50.00	0.57	0.88	45.00	8	8	60.00	0	0	0.00	1.80	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	96.80	96.80
		KP. HU 11	243	252	72.59	9	15	50.00	50.00	0.64	0.74	45.00	25	25	60.00	0	0	0.00	1.80	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	96.80	

Capaian pada IKU indek kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada tahun 2025 sebesar **96,80** atau dengan persentase capaian sebesar **105,2%** dengan kategori '**baik**'. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar **92**. Capaian IKU ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada periode yang sama yaitu sebesar **100**. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **104%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir enstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	85	92,99	87,6	95,94	91	100	92	96,80	93	96,80
% Capaian	-	-	109		109,52		109,89		105,2		104	

Adapun faktor penentu tercapainya IKU ini dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut;

1. Realisasi hari operasi yang mencapai dari target hari operasi dan jumlah objek kelautan dan perikanan yang diperiksa telah terpenuhi dan mendapat nilai yang maksimal yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11.
2. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (KP. Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada tahun 2025 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi terbukti dengan capaian *coverage area* yang optimal sedangkan faktor cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari dan Februari sedangkan antara bulan Maret sampai Desember dapat dimaksimalkan gelar operasi.
3. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak khususnya untuk kedua kapal pengawas yang melakukan perawatan di Batam dan sejauh ini terjalin kerjasama yang baik dengan PT. Palindo Marine di Batam.

4. Selain itu adanya koordinasi dan arahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP terkait strategi dalam pencapaian kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP.
5. Kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakapan kapal yang cukup mumpuni yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sepanjang tahun 2025 baik daring maupun luring. Pada tahun 2024 lalu dan tahun 2025 AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas ditahun 2025.
6. Adanadistribusi PNBP untuk menambah anggaran operasi kapal pengawas Program ekonomi biru juga sebagai landasan dalam penacapaian IKU ini dimana adanya kegiatan yang diarahkan untuk melakukan pengawasan PIT (Penangkapan ikan terukur) dan juga pengawasan wilayah pulau-pulau kecil dan ruang laut melalui Kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan Hiu 11.

Adanya buka tutup blokir dikarenakan kebijakan efisiensi pada awal tahun dan diberikan relaksasi anggaran pada akhir tahun. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 14,900,467,000** dengan realisasi sampai bulan Desember 2025 sebesar **Rp.12,605,266,960** atau dengan persentase sebesar **84,60%**.



Gambar 4. Kegiatan Operasi Kapal Pengawas

3. Indeks Operasi Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang diukur secara kuantitatif yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot}(\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{sp} = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
- Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
- Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari dan 2 objek kelautan per Triwulan

2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.

3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:

- Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:

- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
- Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat Pengawas Triwulan IV tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 8. Perhitungan Indeks Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2025

								Kriteria Nilai		Kriteria Nilai		Kriteria Nilai				
								> 48 Hijau < 48 Merah		> 44 Hijau < 44 Merah		> 1 Hijau < 1 Merah				
Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)			Tindak Lanjut Target Operasi (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
		TW IV			TW IV			TW IV	TW IV			TW IV				
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	10	11	55.0	2	1	25.0	40.00	0.00007	0.00015	45.00	0	0	0.00	85.00	93.00
	Napoleon 37	15	37	123.3	2	5	125.0	50.00	0.00010	0.00030	45.00	0	0	0.00	95.00	
	Napoleon 38	10	21	105.0	2	0	0.0	50.00	0.00007	0.00014	45.00	0	0	0.00	95.00	
	RIB/Sea Rider 05 (WPP-PD)	10	20	100.0	0	0	50.0	50.00	0.00007	0.00018	45.00	0	0	0.00	95.00	
	Speed Boat TB.01 (WPP-PD)	14	14	50.0	0	0	50.0	50.00	0.00009	0.00012	45.00	0	0	0.00	95.00	

Capaian pada IKU indeks kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar **93** atau dengan capaian **101,09 %** dengan kategori '**baik**' rincian hasil pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu **92**. Capaian IKU ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode triwulan IV yaitu sebesar **98,78** atau dengan persentase sebesar **108,55%**. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan pada (semesteran). Pada IKU tahun sebelumnya merupakan IKU cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **100%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025-2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	85	88,5	87,6	93,67	91	98,78	92	93	93	93
% Capaian	-		104		106,93		108,55		101,09		100	

Dapat dijelaskan lebih rinci tercapainya IKU ini dikarenakan beberapa faktor seperti;

1. Realisasi hari operasi yang telah mencapai dan bahkan melebihi dari target hari operasi. Keberhasilan ini dikarenakan kegiatan gelar operasi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dengan pemilihan rute operasi yang tepat disekitar WPPNRI 711 dan 712.
2. Objek kelautan dan perikanan yang diperiksa dapat mencapai target bahkan melebihi dan juga karena kapal yang diperiksa masih dapat dijangkau oleh armada Speedboat pengawas.
3. Kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik walaupun diawal tahun seperti speedboat napoleon 038 mengalami kerusakan sehingga belum bisa melaksanakan gelar operasi, namun pertengahan tahun dapat diupayakan perbaikan dan bisa melaksanakan gelar operasi.

4. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada awal dan pertengahan tahun 2025.
5. Penyebaran operator Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang merata di tiap Satwas/Wilker menjadikan kegiatan gelar operasi menjadi lebih siap dan menggunakan tenaga operator Speedboat yang berkompeten dibidangnya.
6. Selain itu adanya koordinasi dan arahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP terkait strategi pencapaian kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP.

Program ekonomi biru juga sebagai landasan dan acuan dalam penacapai IKU ini dimana adanya kegiatan yang diarahkan untuk melakukan pengawasan PIT (Penangkapan ikan terukur) dan juga pengawasan wilayah pulau-pulau kecil, wilayah konservasi dan ruang laut melalui armada speedboat pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Program buka tutup blokir anggaran juga penting dalam pencapaian ini. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 323,820,000** dengan realisasi sampai bulan Desember tahun 2024 sebesar **Rp. 323,421,960** atau dengan persentase sebesar **99,88%**.



Gambar 5. Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas

4. Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan (Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan Hiu 11) dan 5 (lima) unit (Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, Napoleon 038,037 dan 003, TB 01 dan Searider 05). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari; perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Metode pengukuran yaitu $X_{KP} = \{(\sum a)/(\sum b)\} \times 100\%$, Keterangan: X_{KP} = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP a = Jumlah Sarana Pengawasan yang selesai dirawat b = Target Sarana Pengawasan yang selesai dirawat. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan 31 Desember 2025 penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah dilaksanakan berupa Perawatan Pencegahan (*preventive*), Perawatan Prediktif (*predictive*) dan Perawatan Darurat (*breakdown maintenance*) untuk Kapal Pengawas Hiu 11 dan Hiu Macan 01. Selain itu dilakukan juga Perawatan Pencegahan (*preventive*) Perawatan Prediktif (*predictive*) dan Perawatan Darurat (*breakdown maintenance*), Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber yaitu Napoleon 037,038 dan 003, TB 01 dan RIB/Sea rider 05) dengan realisasi capaian sebesar **100%** atau dengan persentase **100%** dengan kategori '**baik**', capaian ini telah mencapai dari target yang ditentukan sebesar **100%**. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami capaian yang sama yaitu **100%**. IKU ini bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena sudah dimulai pada tahun 2021. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **100%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak 5 Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% Capaian	100		100		100		100		100		100	

Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan;

1. Kegiatan perawatan armada secara rutin yang telah dilakukan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Dimana saat kapal bersandar di dermaga Stasiun PSDKP Pontianak maupun di Batam dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dimana pada lokasi tersebut diatas merupakan lokasi yang telah memenuhi persyaratan dalam kegiatan perawatan preventif dan sejauh ini terjalin kerjasama yang baik dengan PT. Palindo Marine di Batam.
2. Untuk kegiatan perawatan prediktif seperti kegiatan, pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal telah dilakukan di Pontianak dan Batam-Tanjung Pinang yang merupakan di tempat pihak penyelenggara kegiatan tersebut, untuk tempat atau bengkel, tenaga teknis dan suku cadang yang telah tersedia di lokasi yang disebutkan diatas.
3. Untuk perawatan dan perbaikan mesin mercury telah dilakukan indent suku cadang langsung dari penyedia dari pihak mercury dan juga teknisi mercury didatangkan langsung dari Jakarta.

Adapun realisasi anggaran untuk penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Pontianak yaitu **Rp 1,334,415,076** dari pagu sebesar **Rp. 1,335,035,000** atau capaian anggaran **99.95%**. Capaian anggaran ini lebih tinggi dari tahun 2024 lalu yaitu sebesar **99.93%**. Pada sasaran strategis Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif Stasiun PSDKP Pontianak mencapai efisiensi dengan nilai **sebesar 14,26 (%)**. Capaian nilai ini cukup baik dikarenakan capaian output yang dicapai sudah sesuai target dan penggunaan anggaran dengan baik serta penggunaan sumberdaya lainnya.



Gambar 6. Kegiatan Permeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan

5. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Formula perhitungan Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan adalah;

$$X = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$$

Keterangan :

X : nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Xi : nilai data operasi intelijen kelautan

n : jumlah operasi intelijen kelautan

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86

C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

Capaian indikator Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen. Pada tahun 2025 capaian IKU ini sebesar **100** atau dengan persentase sebesar **100%** dengan kategori '**Baik**'. Capaian ini telah mencapai dari target yang ditentukan yaitu sebesar **100**. Nilai ini diperoleh dari komponen jumlah data operasi intelijen kelautan dibandingkan atau dibagi dengan jumlah kegiatan operasi intelijen kelautan yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan operasi intelijen dikalikan faktor kredibilitas dan validitas informasi intelijen yaitu A1 kategori dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain dengan hasil 100. 5 kegiatan intelijen kelautan diantaranya 3 kegiatan intelijen pengelolaan ruang laut di Singawang, 1 kegiatan intelijen ruang laut di Sukamara, Kalimantan Tengah dan 1

kegiatan intelijen usaha penggraman rakyat di Paloh. Rincian kegiatan dapat diakses pada pranala berikut; <https://tinyurl.com/sdkptk2025> sedangkan ringkasan kegiatan disajikan pada tabel berikut;

Tabel 11. Kegiatan Operasi Intelijen SDK Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025

No	Jenis kegiatan	Lokasi	waktu	Hasil
1	kegiatan Reklamasi di Kota Singkawang	Muara Sedau, Kota Singkawang	14 Agustus 2025	adanya kegiatan reklamasi pantai dengan menggunakan material berupa bongkahan batu besar, tanah, dan pasir untuk memperluas daratan di area pesisir pantai Lokasi tersebut *tidak* melewati garis pantai
2	pengamatan terkait kegiatan PRL di Kota Singkawang	Pantai Batu Burung, Kota Singkawang	14 Agustus 2025	warga sekitar dimanfaatkan untuk berjualan bangunan non permanen di daratan wilayah pesisir Taman Burung, bangunan yang menjorok kelaut dengan Panjang $\pm$ 139 meter
3	Kegiatan PRL dan Reklamasi di Kota Singkawang	CV. Sinka Island Park	15 Agustus 2025	terdapat jembatan titian (jeti) dan kegiatan reklamasi pantai dengan menggunakan material berupa bongkahan batu besar, tanah, dan pasir untuk memperluas daratan di area Pantai Tanjung Batau Lokasi tersebut *telah* melewati garis pantai.
4	pemanfaatan ruang laut PT. Tanjung Selaka Resources, Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Desa Sungai Damar, Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara, Prov. Kalteng	15 – 17 September 2025	kegiatan yang berlangsung di lokasi saat ini sebatas pada pengumpulan bahan tambang dan proses pencucian pasir silika. Tidak ditemukan aktivitas pengiriman pada saat pengamatan.
5	PULBAKET terkait kegiatan Usaha Pergaraman Rakyat dan Importasi Garam di Kec. Paloh dan Kec. Sajingan Besar	Kec. Paloh dan Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas	3-6 November 2025	terdapat usaha pergaraman rakyat (memanfaatkan air laut menjadi garam) dan kegiatan jual-beli kebutuhan masyarakat lokal barang-barang Sembako dan garam.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKU baru berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dan Stasiun PSDKP Pontianak belum mengampu IKU ini pada tahun sebelumnya. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2025. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **100%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
% Capaian	-		-		-		-		100		100	

Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai dari target yang telah ditentukan yaitu dengan nilai **100**. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan berbagai hal sebagai berikut;

1. Kegiatan operasi intelijen yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2025
2. Selalu berkoordinasi dengan pokmaswas dan kelompok nelayan dan *stake holder* lainnya dalam hal mendapatkan informasi yang cepat dan akurat
3. Adanya kegiatan diklat intelijen yang dilakukan baik daring maupun luring.
4. Pengawasan berbasis Intelijen merupakan program KKP dan masuk dalam rancangan Rencana Strategis KKP tahun 2025-2029.

Sebagai faktor pendukung anggaran berperan penting dalam pencapaian IKU ini. Untuk mencapai IKU ini pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran yaitu sebesar **Rp. 20.505.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.482.000** atau capaian anggaran sebesar **99,89%**.



Gambar 7. Kegiatan Operasi Intelijen Sektor Kelautan

6. Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan. Operasi intelijen perikanan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan intelijen di bidang perikanan. Agen operasi intelijen perikanan adalah Pegawai pemerintah yang mendapatkan perintah Pengguna (user) untuk menjalankan operasi intelijen. Pengguna (user) operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan. Penerima manfaat operasi intelijen perikanan adalah Menteri, Wamen, Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.

Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan. Formula perhitungan Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan adalah;

$$y_{koip} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$$

y_{koip} : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan
 x_{tahap} : Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan
 x_{respon} : Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan

$$x_{tahap} (nilai) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut:

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	20	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas; Uji taktik, mental, IT, Strategi
2	Pengumpulan	50	Laporan hasil lapangan/ LI
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

$$x_{respon} (nilai) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti Penerima Manfaat}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan kepada Penerima Manfaat}} \times 100$$

Capaian indikator Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan merupakan ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen. Pada tahun 2025 capaian IKU ini sebesar **100** atau dengan persentase sebesar **100%** dengan kategori **'Baik'**. Capaian ini telah mencapai dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar **100**. Pada tahun 2025 capaian IKU ini sebesar **100**, nilai **100** didapat dari besaran target yang tentukan. Kegiatan Operasi Intelijen Perikanan pada tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini terdampak dari efisensi anggaran. Sesuai kaidah dari perhitungan pada manual IKU dan revisi Perjanjian Kinerja 15 Desember 2025 maka dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan yaitu sebesar **100**.

Nilai inilah yang menjadi nilai akhir dan menjadi komponen pembentuk nilai kinerja organisasi Stasiun PSDKP Pontianak.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKU baru berdasarkan renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dan Stasiun PSDKP Pontianak belum mengampu IKU ini pada tahun sebelumnya. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2025. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **100%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100

Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai dari target yang telah ditentukan yaitu dengan nilai **100**. Pada tahun 2025 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terdampak efisiensi anggaran, maka untuk tahun 2026 karena Pengawasan berbasis Intelijen merupakan program KKP dan menjadi prioritas dan masuk dalam rancangan rencana Strategis KKP tahun 2025-2029. Dengan harapan dan perencanaan yang baik kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Untuk mencapai IKU ini pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran yaitu sebesar **Rp 61.790.000** dan sepanjang tahun 2025 telah dilakukan buka tutup blokir anggaran sehingga pagu menjadi **Rp.0** dengan realisasi sebesar **Rp.0** atau capaian anggaran sebesar **0%**. Pada sasaran startegis Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif Stasiun PSDKP Pontianak mencapai efisiensi dengan nilai sebesar **0.11 (%)**. Capaian nilai ini cukup baik dikarenakan capaian output yang dicapai sudah sesuai target dan penggunaan anggaran dengan baik serta penggunaan sumberdaya lainnya yang lebih efektif.

7. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu.

Komponen indikator terdiri dari:

- nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%),
- nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%),
- nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%)

Nilai kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$X = (a \cdot 45\%) + (b \cdot 40\%) + (c \cdot 15\%)$$

Keterangan:

- X : Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan
 a : Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS
 b : Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS
 c : Nilai penyelesaian pengawasan insidental

Penentuan Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Pengawasan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan (30) • Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana Pengawasan Tahunan (5) • Surat Tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Surat tugas (7,5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7,5)
2	Pelaksanaan	65	• Berita Acara Pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Stasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan pengawasan unit usaha Kelautan sebanyak 26 kegiatan dengan rincian atau pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut 17 kegiatan, Pengawasan ALSE sebanyak 3 kegiatan, PW3K sebanyak 1 kegiatan, pengawasan aktivitas reklamasi 1 kegiatan, Pengawasan pencemaran 4 kegiatan. Kegiatan Pengawasan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan melakukan kegiatan pengawasan rutin selain OSS dan insidental. Rincian rekapitulasi kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan tahun 2025 dapat diakses pada pranala <https://tinyurl.com/sdkptk2025>

Ringkasan capaian pengawasan pelaku usaha kelautan tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 14. Capaian Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Pengawasan Ruang laut Izin dasar PKKPR	20	17
2	Pengawasan ALSE		3
3	PW3K		1
4	Reklamasi		1
5	Pencemaran SDI	2	4
Jumlah		22	26

Pada Triwulan IV tahun 2025 capaian nilai Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **100** atau dengan persentase sebesar **120%** dengan kategori '**Istimewa**' yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : a). Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS bobot 45. Nilai didapat dari bobot maksimal, pada kondisi UPT Stasiun PSDKP Pontianak belum melakukan kegiatan OSS, maka sesuai kaidah perhitungan pada manual IKU bahwa kondisi UPT Stasiun PSDKP Pontianak belum melakukan Pengawasan

Berbasis OSS sehingga mendapatkan bobot maksimal perhitungan.b). Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS bobot 40 didapat dari 22 kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan dan c). Nilai penyelesaian pengawasan insidental dengan bobot 15 dari 4 kegiatan pengawasan. Capaian IKU **100** ini telah melebihi dari target yang telah ditentukan pada triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar **82** atau sebesar **120%**. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2024 mengalami capaian yang sama yaitu **100**. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja bulan Desember Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini juga dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **116%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 15. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	-	-	-	-	100	100	100	100	82	100	86	100
% Capaian	-		-		100		100		120		116	



Gambar 8. Kegiatan Pengawasan Sektor Kelautan

Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini dikarenakan sebagai berikut;

1. Jumlah Polsus PWP3K yang tersebar di Satwas/Wilker yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan sektor kelautan dengan jarak yang dekat pada lokasi pengawasan.
2. Kewenangan dan aturan yang lebih komprehensif di sektor kelautan juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan sektor kelautan.
3. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau program ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan kegiatan tersebut antaranya adalah pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan dan kegiatan pengawasan wilayah konservasi serta pembersihan pantai dan laut dari sampah plastik.
4. Pada awal tahun 2025 dilakukan pertemuan koordinasi Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak secara daring dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya Kelautan.
5. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak.
6. Dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor kelautan via whatsapp untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya kelautan.
7. Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PSDK dan mengikuti perkembangan kemajuan pengawasan dibidang perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK.

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 90.401.000** dan sampai Desember 2025 telah terealisasi sebesar **Rp 90.380.784** atau sebesar **99,98%**. Kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun kegiatan ini terdampak dari efisiensi anggaran dan sampai bulan Desember ini telah tercapai capaian kinerja yang ditargetkan. Pada sasaran strategis Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Stasiun PSDKP Pontianak mencapai efisiensi dengan nilai sebesar **18,20 (%)**. Capaian nilai ini

cukup baik dikarenakan capaian output yang dicapai sudah sesuai target dan penggunaan anggaran dengan baik serta penggunaan sumberdaya lainnya yang lebih efektif. Nilai capaian ini cukup baik dikarenakan output yang dicapai telah mencapai dari target yang ditentukan. Kegiatan dapat dilakukan pada lokasi yang terdekat dari kantor dan yang tersebar di Satwas /Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

8. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; dan 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat). Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa. Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan. Jika tidak ada pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pembinaan/perbaikan, maka nilainya adalah 100. Rekomendasi pembinaan/perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian

hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Untuk formula perhitungan capaian adalah;

$$y_{kpsdp} = \frac{x_{psp} + x_{ppus}}{2}$$

y_{kpsdp} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

x_{psp} : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

x_{ppus} : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Tabel 16. Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPD	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
Jumlah Nilai		100	

$$x_{ppus} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

Pada Triwulan IV Tahun 2025 capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **100** atau dengan persentase **120%** dengan kategori '**Istimewa**'. IKU ini telah melampaui dari target yang ditentukan pada tahun 2025 yaitu sebesar **82**. Capaian ini didapat dari pemenuhan berbagai komponen (x_{psp}) nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur dimana jumlah akumulasi nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha dibagi jumlah kegiatan pemeriksaan pelaku usaha sehingga dengan nilai rata-rata 100.

Komponen (Xppus) nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan didapat dari 5 pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan dibagi 5 pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan dikali 100 sehingga mendapatkannilai 100. Dari kedua komponen (Xpsp)+ (Xppus)/2 dengan nilai **100**, nilai inilah yang menjadi nilai IKU komponen pembentuk Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak.

IKU ini apabila dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2024 mengalami capaian yang sama yaitu **100**. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 revisi perjanjian Kinerja bulan Desember 2023. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **116%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-	-	-	-	100	100	100	100	82	100	86	100
% Capaian	-		-		100		100		120		116	

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan sampai Desember tahun 2025 adalah **100** yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 30 Desember 2025 telah dilakukan pengawasan sebanyak 21 lembaga dan jumlah inilah yang menjadi komponen pembetukan nilai capaian IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumberdaya Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 18. Rekapitulasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Bidang Perikanan

NO	Kegiatan Pengawasan	Target	Capaian TW IV
1	Pembudidayaan Ikan	14	9
2	Unit Pengolahan Ikan		2
3	Distribusi dan importasi		3
4	Jenis ikan dilindungi		7
Jumlah		14	21

Capaian pengawasan rutin pengawasan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 19. Rekapitulasi Penerbitan HPK-SLO Ilingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025

	Izin Pusat	Izin Daerah
HPK D	1462	1752
HPK B	1476	1769
SLO	1428	1729
SKP SLO	48	40

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor Penangkapan ikan seperti tabel di atas hal. Pengawasan insedintial juga telah dilakukan pada subsektor pembudidayaan ikan, Unit Pengolahan Ikan dan distrbusi hasil perikanan sebanyak 16 kegiatan. Pengawasan wasrisk telah dilakukan sebanyak 5 pelaku usaha OSS. Rincian rekapitulasi kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan tahun 2025 dapat diakses pada pranala <https://tinyurl.com/sdpptk2025>

Capaian indikator kinerja yang sudah dicapai sesuai target ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti pengawasan usaha budidaya ikan, distribusi perikanan, unit pengolahan ikan. Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan

perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan.

2. SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
3. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Pada awal tahun 2025 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak secara daring dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan.
5. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak.
6. Dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan.
7. Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PSDP dan mengikuti perkembangan kemajuan pengawasan dibidang perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDP.
8. Pengawasan berbasis OSS juga telah dilaksanakan dimana pengawasan melalui sistem data digital telah mulai berjalan dengan baik.

Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Triwulan IV tahun 2025 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang sudah mulai berjalan dengan baik di lokasi yang ditentukan seperti Sungai Rengas, Sungai Kakap, Pemangkat, Selakau dan Ketapang yang kemudian sebagai langkah terukur dalam menambah

PNBP pada sektor perikanan. Selain itu adanya program migrasi kapal kewenangan daerah yang sekarang menjadi kewenangan pusat.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 400.000.000** sebagai pagu awal kemudian sampai dengan 31 Desember 2025 adanya blokir karena program efisiensi anggaran secara nasional menjadi pagu efektif sebesar **Rp. 184.774.000** dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar **Rp.184.770.248** atau dengan realisasi **100%** dengan tingkat jumlah realisasi yang cukup baik. Kegiatan ini terdampak dari efisiensi anggaran namun kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Nilai capaian ini cukup baik karena telah memanfaatkan anggaran dan sumberdaya lainnya dengan efektif. Pada sasaran strategis Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak mencapai efisiensi dengan nilai sebesar **50%**. Capaian nilai ini cukup baik dikarenakan capaian output yang dicapai sudah sesuai target dan penggunaan anggaran dengan baik serta penggunaan sumberdaya lainnya yang lebih efektif. Nilai capaian ini cukup baik dikarenakan output yang dicapai telah mencapai dari target yang ditentukan. Kegiatan dapat dilakukan pada lokasi yang terdekat dari kantor dan yang tersebar di Satwas /Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.



Gambar 9. Kegiatan Pengawasan Sektor Perikanan

9. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan kategori indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan dan melakukan kegiatan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, sebesar **81** diperoleh dari ketentuan sebagai berikut ; Komponen perhitungan terdiri dari :

1. Pengenaan sanksi administratif Kelautan dan perikanan terhadap tindak lanjut analisis SPKP sebanyak 54 analisis tindak lanjut dan sudah ditindak lanjuti sebanyak 54 perkara atau dengan capaian 100%;
2. Pengenaan sanksi administratif non SPKP di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 31 perkara (SP-1; 27 perkara, SP-2; 2 perkara, Paksaan Pemerintah; 3 perkara) dengan capaian 100% . Nilai rata-rata penetapan sanksi administratif dari dua komponen sebesar **100%**, capaian sebesar **100%** berdasarkan tabel termasuk dalam kategori indeks **81**.

Adapun pencapaian pengenaan saksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 20. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	UPT	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP (%)	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Selain SPKP (%)	Rata-Rata (%)	Kriteria Nilai Indeks (Nilai)
		Kolom A	Kolom B		
1	Pontianak	100%	100%	100%	81

Capaian IKU ini sebesar **81** telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar **81** atau persentase capaian sebesar **100%** dengan kategori '**Baik**'. Capaian IKU ini sama apabila dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama mencapai nilai dengan persentase sebesar **100%**. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir karena dimulai pada tahun 2023. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **95%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	80	80	80	80	81	81	85	81
% Capaian	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	95	95

Faktor keberhasilan IKU ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan armada KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dalam pengawasan objek kelautan maupun perikanan;

2. Tindak lanjut data dari Pusdal terkait dugaan pelanggaran SPKP dapat diselesaikan dengan baik sepanjang tahun 2025 baik dengan daring maupun luring;
3. Adanya pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi, objek kelautan dan pemasaran serta unit budidaya perikanan oleh pengawas perikanan dan Polsus PW3K;
4. Penyelesaian kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan;
5. Koordinasi yang terjalin dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu membantu dalam proses ekspose perkara maupun penetapan denda dan rapat perhitungan capaian IKU secara daring dirasa cukup membantu dan mendukung dalam pencapaian IKU ini.

Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2025 telah dianggarkan sebesar **Rp. 90.240.000** kemudian adanya revisi blokir anggaran karena adanya efisiensi anggaran menjadi **Rp. 32.779.000** sampai dengan 31 Desember telah realisasi sebesar **Rp. 32.777.704** atau sebesar **100%**. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 10. Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan yang tertuang dalam Indikator kinerja "Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan

pelanggaran dari analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$X_{TLH} = \sum \frac{(X_1+X_2+X_n)}{n} \times 100\%$$

- X_{TLH} : Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP;
 $X_1+X_2+X_n$: Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi (SP1, SP2 dan denda administratif dan bukan pelanggaran
 n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan IV tahun 2025 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 54 perkara/dugaan pelanggaran diantaranya adalah dugaan pelanggaran daerah penangkapan ikan sebanyak 8 kasus dan dugaan pelanggaran jalur >12 nm sebanyak 43 kasus, zona konservasi 3 kasus. Analisa lanjutan yang dilakukan adalah 54 kasus telah ditindak lanjuti d sehingga didapat nilai 100%. Kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut 54 kasus sudah ditangani dan telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan dengan telah diterbitkan surat pemanggilan. Didapat hasil berupa 17 merupakan bukan pelanggaran dan sebanyak 37 kasus merupakan pelanggaran dan telah diberikan surat peringatan I. nilai realisasi sebesar 100% kalau dikonversi kedalam indeks maka capaian tersebut masuk kategori indeks **81**. Nilai inilah yang menjadi capaian pada triwulan IV tahun 2025. Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan IV tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 22. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Perkara	Selesai diperiksa (xn)	Dugaan Pelanggran (n)	Capaian (% XTLH)
DPI	8	8	100
Daerah Konservasi	3	3	
Jalur >12	43	43	
Jumlah	54	54	

IKU ini telah tercapai dari target yang telah ditentukan pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar **81** atau dengan persentase capaian **100%** dengan kategori '**Baik**'. Capaian IKU ini menncapai nilai yang sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 periode yang sama yaitu dengan persentase sebesar **100%**. Dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2023 maka IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **95%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	80	80	80	80	81	81	85	81
% Capaian	-		-		100		100		100		95	

Faktor keberhasilan IKU ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan penindakan atau tindak lanjut yang berupa pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang terduga melanggar sistem pemantauan kapal perikanan di WPPNRI 711 dan 712

2. kegiatan dilakukan pada Satwas dan Wilker PSDKP yang terdekat terduga melakukan pelanggaran. Adanya informasi dan distribusi data dari sistem pemantaun kapal perikanan Direktorat POA yang secara cepat distribusinya ke UPT Stasiun PSDKP Pontianak sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
3. Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang tersebar di Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Selalu koordinasi dan kerjasama kepada Stasiun PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Batam untuk melakukan proses pemanggilan dan BAP pada lokasi domisili pelaku usaha tersebut.
5. Selain itu adanya aplikasi Platform LENSEA-KP juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian analisis SPKP.
6. Adanya Monev secara berkala tentang progres pencapaian analisis data SPKP oleh Direktorat POA maupun Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP

Dukungan IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki pagu anggaran yang sama dan melekat pada pagu IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan. Pada sasaran strategis "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan" mencapai efisiensi dengan nilai sebesar **66,67%** dengan capaian ini dapat dikatakan sasaran strategis telah mencapai hasil yang baik.

11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap III ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Sebagai catatan tambahan dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut;

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwuln penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit diakhir bulan perhitungan triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada triwulan berikutnya.
- (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

Pencapaian nilai penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak diukur dengan membandingkan jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) atau sudah

mempunyai putusan tetap dengan jumlah kasus yang ditangani 1 perkara yang sudah *inkracht* dibagi dengan total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan yaitu sebanyak 1 perkara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar **100%**. Nilai capaian **100%** kalau dikonversikan masuk dalam kategori indeks **81** atau dengan kategori '**Baik**'. Capaian penanganan perkara TPKP sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 24. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Unit Kerja	TW IV Tahun 2025		Capaian TW IV Tahun 2025
	Total Kasus	Kasus Selesai	
Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100

Nilai **81** ini yang menjadi nilai Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Capaian pada triwulan IV tahun 2025 sebesar **81** telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar **81** atau dengan persentase capaian sebesar **100%**. Capaian pada IKU "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak" 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2024 pada periode triwulan IV karena pola perhitungan yang berbeda, pada tahun 2024 tidak diklasifikasikan kedalam kategori indeks sedangkan pada tahun 2025 dilasifikasikan kedalam kategori indeks. IKU ini merupakan IKU yang dimulai pada 2025 revisi Perjanjian Kinerja Desember 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **95%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81	85	81
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	95	95

Capaian yang telah dicapai Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan beberapa faktor keberhasilan seperti;

1. Bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan Hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, sehingga dalam proses penanganan perkara lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dilaksanakan.
2. Kinerja dari PPNS Stasiun PSDKP Pontianak yang selalu cepat dan tanggap dalam melakukan penyidikan di lingkungan Stasiun PSDKP Pontianak.
3. Pada kasus pelanggaran pemanfaatan telur penyu merupakan jaringan internasional yang mana harus berkoordinasi dengan negara tetangga Malaysia, sehingga informasi dari saksi-saksi dapat ditelusuri dan penanganan dapat berjalan sesuai waktunya.



Gambar 11. Kegiatan Peyeleasaan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 mendapat pagu sebesar **Rp. 116.375.000** untuk penyidikan TPKP kemudian adanya revisi anggaran sehingga anggaran menjadi **Rp. 63.806.000** sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi anggaran sebesar **Rp. 62.708.411** atau sebesar **98,28%**. Pada sasaran startegis Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif dan Sesuai Ketentuan Stasiun PSDKP Pontianak mencapai efeisiensi dengan nilai sebesar **1,72%**. Dapat dikatakan IKU ini dapat tercapai dengan baik walupun terdampak efisiensi anggaran. . Rekapitulasi dan pola perhitungan IKU ini secara rinci dapat diakses pada pranala berikut; <https://tinyurl.com/ppptk2025>

12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024

Target NKPA Level II Tahun 2024 sebesar 71.00 (nilai) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain;

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan :

NKPA Satker

NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, pengguna SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

a. Efektivitas

1. Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK} \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks SBK_i - Indeks RA SBK_i}{Indeks SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker
 CRO : Capaian RO Penggunaan
 SBK : Penggunaan SBK
 NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi
 WCRO : Bobot Capaian RO
 WPenggunaan sbk : Bobot Penggunaan SBK
 WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Hasil pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu, Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 nilai NKPA tercapai sebesar **89,41** dengan persentase sebesar **120%** dengan kategori **'Istimewa'**. Capaian ini terbentuk dari perolehan nilai efektifitas capaian sebesar 100, Efisiensi Penggunaan SBK sebesar 80 dan Efisiensi SBK 42,70. Capaian NKPA Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 26. Capaian NKPA Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2025

No	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
1	Stasiun PSDKP Pontianak	89,41	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
			100	80	42,70

Target tahun 2025 NKPA lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **71,5** sehingga dapat dikategorikan capaian **89,41** ini melampaui dari target yang telah ditentukan. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana capaian pada tahun 2024 pada periode yang sama mencapai nilai sebesar 98,89. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun 2023 adalah indikator kinerja berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena baru dimulai pada tahun 2024. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **108%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 27. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	71	98,89	71,5	89,41	82,5	89,41
% Capaian	-	-	-	-	-	-	120		120		108	

Tercapainya target indikator kinerja NKPA pada tahun 2024 disebabkan oleh optimalnya nilai capaian realisasi output yang berbanding lurus dengan realisasi anggaran, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dari komponen tersebut mendapat nilai yang baik. Efisiensi SBK Stasiun PSDKP Pontianak dengan dengan capaian cukup optimal dari bobot 25. Selain itu adanya koordinasi dan kerjasama dengan KPPN Pontianak dalam pengelolaan Keuangan Satker sehingga dapat membantu dan memberikan solusi ketika mengalami kendala. Dengan diimbangi pencapaian yang baik terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran. Adanya bimtek pengelolaan kinerja anggaran dari Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Maupun dari Kementerian Keuangan menjadikan tercapainya indikator kinerja ini.

13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Pontianak

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian

IKU IKPA adalah 1). Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II; 2). Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu *close* penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2025 sebesar **94,58** atau dengan capaian persentase sebesar **102,80%** dengan kategori '**Baik**'. Secara rinci capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konvers Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	78.97	93.88	100.00	100.00	89.61	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.85	18.78	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.49		95.87				100.00				

Gambar 12. Capaian IKPA tahun 2025

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2025 sebesar **94,58** atau dengan persentase sebesar **102,8%**. Telah mencapai dari target tahun 2025 yang telah ditentukan yaitu sebesar **92**. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dimana capaian tahun 2024 sebesar **90,57** atau dengan persentase sebesar **96,60%**. Indikator kinerja dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena pada tahun 2020 sudah dimulai indikator kinerja ini. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dan dilanjutkan dengan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029. Perbandingan Capaian IKPA selama 5 tahunnya terakhir dan IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **103%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	89	91,07	89	93,39	93,75	92,45	93,76	90,57	92	94,58	92,2	94,58
% Capaian	102,32		120		98,61		96,60		102,80		103	

Indikator kinerja ini telah tercapai dari target yang ditentukan sebesar 92. Tercapainya dan berhasilnya capaian indikator kinerja ini dari target nilai IKPA pada Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Tepenuhinya pada komponen nilai penyerapan anggaran yang mendapat nilai 18,78 dari bobot maksimal 20. Adanya perolehan nilai yang optimall dari penyerapan anggaran adalah diakibatkan pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan Kementerian Keuangan pagu yang dibebankan dapan terealisasi secara baik;
2. Revisi DIPA mendapatkan nilai yang maksimal yaitu mendapat nilai10 dari bobot 10;
3. Belanja kontraktual, penyelesaian tagihan dan capaian ouput mendapat nilaiyang maksimal dikarenakan penyeleasaan kegiatan secara baik;
4. Dispensasi SPM mendapatkan hasil yang baik dengan tidak adanya pengurangan nilai pada komponen ini.

Selain itu adanya koordinasi dan kerjasama dengan KPPN Pontianak dalam pengelolaan Keuangan Satker sehingga dapat membantu dan memberikan solusi ketika mengalami kendala. Dengan diimbangi pencapaian yang baik terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran. Adanya bimtek pengelolaan kinerja anggaran dari Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Maupun dari Kementerian Keuangan menjadikan tercapainya indikator kinerja ini. Upaya perbaikan kedepannya adalah meningkatkan nilai IKPA periode berikutnya terutama meningkatkan pada komponen yang belum optimal tersebut. Diupayakan mengikuti kegiatan

pengelolaan kinerja anggaran dari Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Maupun dari Kementerian Keuangan.

14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak merupakan perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.

- Diklat 20JP dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
- Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.
- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a. Workshop,
 - b. Pelatihan Manajerial,
 - c. Pelatihan Sosio Kultural,
 - d. Sosialisasi, dan
 - e. Bimbingan Teknis.
- Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
- Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	DIII	25	23	21	20	15	10
		S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :

$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat fungsional} + \text{Diklat 20 jp} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

- ASN Staf :

$(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat 20 jp} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

Tahun 2025 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak sebesar **86,91** atau persentase capaian sebesar **107,30%** dengan kategori '**Baik**'. Capaian pada Triwulan IV ini Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar **81**. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana capaian pada Tahun 2024 yaitu sebesar **89,91** atau persentase sebesar **109,65%**. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dan dilanjutkan pada periode PSDKP 2025-2029. Indikator kinerja ini bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **105%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	73	78,76	77	80,99	72	90,59	82	89,91	81	86,91	83	86,91
% Capaian	108		105		116		109		107		105	

Perbandingan Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

IKU ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai dari target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya;

1. Pengelolaan pegawai pada Stasiun PSDKP Pontianak dimana tidak terlepas dari penyusunan kebutuhan kompetensi pegawai tahun 2025 yang dilakukan akhir tahun 2024.

2. Dengan dasar penyusunan kebutuhan kompetensi pada tahun 2025 ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Pontianak difasilitasi dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis melalui diklat dan bimtek sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan
3. Keaktifan pegawai Stasiun PSDKP Pontianak yang secara mandiri untuk mencari informasi kegiatan seminar/bimtek/workshop secara daring dan luring sehingga nilai IP ASN Stasiun PSDKP Pontianak terpenuhi seperti pegawai telah mengikuti Diklat Umum/Teknis/Fungsional di *e-milea* atau kanal-kanal lainnya untuk mencapai peningkatan kompetensi pegawai;
4. Tingkat kedisiplinan pegawai juga tinggi terbukti dengan tidak adanya yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2025.

Nilai capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 sebesar **86,91** dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 30. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025

Unit kerja	Jumlah pegawai yang dihitung	Kualifikasi (Bobot 25%)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Keterangan
		IP	%	IP	%	IP	%	IP	%		
Stasiun PSDKP Pontianak	89	22,75	91	34,44	86,61	24,74	82,46	5	100	86,91	TINGGI

15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak

Pengukuran capaian terhadap nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak bersumber pada komponen antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Mekanisme perhitungan nilai Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak dibagi kedalam 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dimana capaian Stasiun PSDKP Pontianak yaitu pada nilai Perencanaan Kinerja yaitu 27,60, Pengukuran Kinerja yaitu 27,60, Pelaporan Kinerja yaitu 12,75 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 20. Kemudian nilai skor akhir pada penilaian yaitu **87,95** dengan predikat A atau dengan persentase sebesar **102,26%** atau dengan kategori '**Baik**'. Hasil tersebut dimana nilai diambil dari bobot Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 25%, lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel 31. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025

Unit Kerja	Aspek				Jumlah	Predikat
	Perencanaan Kinerja (Bobot 30)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25)		
Stasiun PSDKP Pontianak	27,60	26,10	12,75	20	87,95	A

Capaian sebesar **87,95** ini telah melebihi target yang telah ditentukan dimana target untuk tahun 2025 yaitu sebesar **86**. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu dengan capaian lebih tinggi dimana capaian tahun 2024 sebesar **86,75** dengan predikat A atau persentase sebesar **103,27%**. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 sedangkan pada tahun sebelumnya sebagai indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **99%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak					80,5	79,55	84	86,75	86	87,95	88,8	87,95
% Capaian					98,81		103,27		102,26		99	

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar **87,95** atau persentase sebesar 102,26% dan telah melampaui target yaitu sebesar **86**. Telah tercapainya target indikator kinerja tahun 2025 ini disebabkan karena dari semua 4 komponen penilaian telah terpenuhi. Ketersedian dokumen dan kualitas dokumen telah terpenuhi dengan baik. Tim SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak juga telah mengikuti *workshop/bimtek* SAKIP tahun 2025 melalui portal *e-learning* KKP dan

sudah memiliki sertifikat SAKIP sehingga SDM pengelolaan sudah mempunyai kapabilitas. Selain itu adanya bimbingan teknis penilaian mandiri SAKIP tahun 2025 oleh Setditjen PSDKP yang secara optimal menjadikan proses penilaian mendapatkan hasil yang baik.

16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 dan telah diperbaharui dengan PermenKP Nomor 61/PERMEN-KP/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 dan telah diperbaharui dengan PermenKP Nomor 61/PERMEN-KP/2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 31 Desember tahun 2025 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **100%** dengan kategori '**Baik**' mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar **100%**. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 pada periode yang sama, mengalami pencapaian yang sama yaitu **100%**. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena baru ada pada tahun 2023. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **99%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
% Capaian	-		-		100		100		100		100	

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR pada Triwulan IV tahun 2025 ditiap dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Rekomendasi Manajemen risiko juga telah ditindak lanjuti. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko

melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap bulan. Penyusunan dokumen Manajemen Risiko di tiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Risiko bagian Dukman atau Tata Usaha, Manajen risiko bagian sarana dan Prasarana, manajemen risiko Pengawasan SDK, Manajemen risiko pengawasan SDP dan Manajemen risiko Penanganan Pelanggaran. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti *workshop* dalam penyusunan dokumen manajemen risiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mecapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2025. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 34. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	18	18	100

17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2024 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2025 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan IV tahun 2025 sebesar **95%**. Sampai 31 Desember tahun 2025 didapat capaian sebesar **100%** dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan Triwulan IV tahun 2025 terdapat 1 rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP RI dimana sudah ditindak lanjuti dan disampaikan sebanyak 1 tindak lanjut. sehingga capaian **100%** atau dengan persentase capaian **105,26%** dengan kategori '**Baik**'. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu **95%**.

Capaian indikator kinerja ini sama apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 dimana capaian pada tahun 2024 sebesar **100%**.

Karena merupakan Indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2022 sehingga indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **112%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70	100	75	75	80	100	95	100	89	100
% Capaian	-		142		100		120		105		112	

Keberhasilan dan tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara renponsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan seperti rekomedasi terhadap kegiatan pelaksanaan “Ekonomi Biru” di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Adanya asistensi dari Sesditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP melalui daring dalam membantu penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Stasiun PSDKP Pontianak. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 36. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100	0	0

18. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

- U1-Persyaratan Layanan
- U2-Kemudahan Prosedur
- U3- Waktu Penyelesaian
- U4-Kesesuaian Biaya
- U5-Kesesuaian Produk

U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas

U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas

U8-Layanan Konsultasi

U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

>88,31 : Sangat Baik

76,61-88,30: Baik

65,00-76,60: Kurang Baik

Pemenuhan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Stasiun PSDKP Pontianak terhadap kegiatan pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kedatangan kapal (HPK - D) pada Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar **95,18**. Capaian ini melampaui dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan IV yaitu sebesar **80** atau dengan presentase capaian **118,98%** dengan kategori '**Istimerwa**'. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dengan merujuk pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi). Dimana pada tahun 2025 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini merupakan pemisahan dari kedua komponen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) menjadi komponen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan HPK-D layanan hasil pemeriksaan kedatangan kapal perikanan.

Pengolahan dan penarikan data capaian berdasarkan aplikasi Sisusan yang didapat dari survey pengguna layanan. Capaian indikator kinerja ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar **93,38**. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **106%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian tiap tahunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak							80	93,88	80	95,18	89,5	95,18
% Capaian							117		119		106	

Dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan HPK-D merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO dan HPK-D dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Kegiatan survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah;

1. Langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: lapor.go.id dan kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak.
2. Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman,

Transparan, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

3. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih.

Stasiun PSDKP Pontianak dalam hal ini akan tetap terus berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

Data IKM

Triwulan 4

2025

Submit

Data Rekap per UPP per Layanan Tw 4/2025 - Kepmen 20/2025

Download Data

10

entries per page

Search...

Kd					Jml													
Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM		
psdkp	Stasiun PSDKP Pontianak	2025	4	Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	137	3.84	3.78	3.75	3.91	3.82	3.74	3.74	3.75	3.77	3.79	94.75		
psdkp	Stasiun PSDKP Pontianak	2025	4	Standar Laik Operasi (SLO)	198	3.89	3.86	3.82	3.91	3.86	3.74	3.74	3.78	3.77	3.82	95.48		

Showing 1 to 2 of 2 entries

Gambar 13. Tangkapan Layar Capaian IKM Pelayanan Publik

19. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak Nilai pengawasan kearsipan telah diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ KKP dengan capaian sebesar **92,5** kategori **AA (sangat memuaskan)** atau dengan persentase capaian sebesar **120%** dengan kategori **'Istimewa'**. Capaian ini telah melampaui dari target yang telah ditentukan sebesar **75**. IKU ini dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dimana capaian pada tahun 2024 sebesar **85**, karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2024 dan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun

terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **110%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	70	85	75	92,5	84	92,5
% Capaian	-		-		-		120		120		110	

Tercapainya IKU ini dikarenakan kegiatan pengelolaan dari aspek arsip dinamis telah dilaksanakan seperti penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip yang telah sesuai ketentuan dan telah mendapat nilai maksimal yaitu sebesar **70**. Dari aspek Sumberdaya kearsipan seperti SDM Kearsipan dan prasana dan sarana kearsipan mendapatkannilanyang cukup baik yaitu **22,50**. Penggunaan arsip di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah sesuai dan kaidah yang berlaku dan mendapat nilai maksimal yaitu sebesar **25**, kemudian dari komponen pemeliharaan arsip juga mendapat nilai maksimal yaitu sebesar **25** dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah memelihara arsip dengan baik.

Komponen penentu lain yaitu seperti aspek sumber daya kearsipan dengan bobot nilai optimal. Kearsipan Stasiun PSDKP Pontianak telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan kearsipan baik daring maupun luring. Kemudian Prasarana dan Sarana Kearsipan mendapatkan nilai optimal. Hal ini tentunya Stasiun PSDKP Pontianak juga telah memiliki sarana berupa gudang arsip yang cukup komprehensif. Nilai capaian Indikator kinerja Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 39. capaian Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB - ASPEK	NILAI SUB - ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2.200,00			100,00	0,70	70,00
	1.1 SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP	700,00	700,00	0,20	20,00		
	1.2 SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP	200,00	200,00	0,20	20,00		
	1.3 SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	1.100,00	1.100,00	0,35	35,00		
	1.4 SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200,00	200,00	0,25	25,00		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	400,00			75,00	0,30	22,50
	2.1 SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	300,00	150,00	0,50	25,00		
	2.2 SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	100,00	100,00	0,50	50,00		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						1,00	92,50
KATEGORI NILAI AKHIR				AA (SANGAT MEMUASKAN)			

20. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi.

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek aspek Kebaruan/Nilai tambah (15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:

Nilai	Predikat
>89 – 100	Sangat Memuaskan
>80 – 89	Memuaskan
>70 – 79	Sangat Baik
>60 – 69	Baik
>50-60	Cukup
>30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat Kurang

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 telah menghasilkan 1 inovasi yang diberi nama CLKB “ Cinta Laut Bersih Kalimantan Barat” yang menitik beratkan kepada layanan konsultasi, pengaduan, forum diskusi, layanan publik dan informasi tentang kebersihan laut di Kalimantan Barat. Inovasi ini telah disertakan dalam lomba inovasi dan telah ikut dikompetisikan lingkup Ditjen PSDKP. Target dalam tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar **77** dan sampai dengan Triwulan IV 2025 berdasarkan Berita Acara Penilaian Inovasi telah dicapai nilai sebesar **75,55** atau persentase sebesar **98,12%** dengan kategori **‘Baik’**. Capaian tahun 2025 ini belum mencapai dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar **77**. Capaian indikator kinerja dapat dijelaskan pada dan diakses pada pranala berikut; <https://tinyurl.com/inovasiptk2025>

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2024 lalu dikarenakan pada tahun 2024 perhitungan indikator kinerja menggunakan jumlah inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sedangkan tahun 2025 telah menggunakan penilaian Lembar Kerja Evaluasi. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **104,39%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 40. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	77	75,55	80	75,55
% Capaian	-		-		-		-		98		94	

Secara umum indikator kinerja ini dapat mencapai secara baik karena Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 telah menghasilkan 1 inovasi yang diberi nama CLBK. Namun secara penilaian Lembar Kerja Evaluasi masih belum mencapai dari taarget yang dicapai. Hal ini dikarenakan adanya perubahan Perjanjikan Kinerja pada pada akhir tahunyaitu 15 Desember 2025 dimana penilaian sebelumnya menggunakan jumlah inovasi yang dihasilkan dan yang

terapkan sehingga kesiapan penilaian menggunakan LKE masih tergolong baru. Kemudian dari tim penilai memberikan hasil yang kurang optimal dengan melihat aspek inovasi yang dihasilkan dan diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak masih belum memberikan dampak yang komprehensif.

21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengukuran nilai Implementasi Program Budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak berpedoman pada sebagaimana budaya kerja itu sendiri telah dilaksanakan pada unit kerja, dimana program-program budaya kerja Ditjen PSDKP sebanyak 11 (sebelas), antara lain:

1. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU);
2. Lima menit sebelum jadwal;
3. Ringkas, rapi, resik, rawat rajin (5R);
4. Upayakan data terkini (UPDATE);
5. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi dan Arsipkan (ORCA);
6. Tegakkan aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT);
7. Belanjakan Anggaran secara realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA);
8. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK);
9. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP);
10. Hargai, Motivasi dan Inisiatif (HARMONIS) dan
11. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).

Target dalam tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar **70** (nilai) dan sampai dengan Triwulan IV 2025 telah tercapai dengan capaian sebesar **77,25** atau prosentase sebesar **110,36%** dengan kategori '**Istimewa**'. Capaian dalam indikator kinerja ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar **73,23** atau dengan persentase sebesar **104,67%**. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir dikarenakan dimulai pada tahun 2022 dengan pola perhitungan dan target 21. IKU ini apabila dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP periode tahun 2025-2029 dengan target akhir periode Renstra 2025-2029 sebesar **104,39%**. Adapun perbandingan tiap tahunnya dan dengan akhir periode Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029 dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 41. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025		thd target akhir Renstra 2025- 2029	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak			21	23,69	21	24,85	70	73,27	70	77,25	74	77,25
% Capaian			113		118		104		110,36		104	

1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja ini yaitu; Pimpinan unit kerja ikut menggalakan kegiatan Budaya Kerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak kedalam keseharian bekerja.
2. Semua pegawai serta peran dari tim Sekretariat dan Fasilitator yang aktif dalam pembentukan budaya kerja. Pada saat apel dan group whatapp selalu disampaikan untuk tidak menyalakan listrik disaat pulang kantor dimana tindakan ini merupakan mendukung program pemerintah untuk Gerakan Hemat Energi (*Go Green*).
3. Lingkungan kantor selalu sudah mengurangi penggunaan boto lplastik atau botolair kemasan dari plastik
4. Pada saat akandimulaikegiatanarapat atau apelpagiseluruh pegawaitelah menerapkanhadir 5menit sebelumacara dimuai
5. Selalu dilakukan Hiumbauan dan dilaksanakan lomba kebersihan lingkungan kantor lingkup Stasiun PSDKP Pontianak untuk mendukung program Ringkas, rapi, resik, rawat rajin (5R).

Untuk mencapai Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan ini telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 18,181,318,000** kemudian adanya revisi blokir anggaran sehingga anggaran efektif menjadi **Rp. 16,142,480,000** dan sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 15,836,059,980** atau dengan persentase sebesar **99,55**. Nilai tingkat efeisiensi pada sasaran ini yaitu sebesar **0.07%**. Pencapaian realisasi kegiatan dan realisasi anggaran sudah cukup baik dan sudah sejalan selaras dengan yang telah direncanakan. Pencapaian pada sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Efisiensi yang cukup baik ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada

Triwulan IV tahun 2025 telah memanfaatkan sumberdaya baik itu keuangan dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien.

Efisiensi pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut:

1. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.
2. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Goup Komunikasi bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari eksternal kantor yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-711 dan 712. Dari komunikasi ini diharapkan banyak issue yang dapat dikembangkan dan juga banyak sumbang saran atas partisipasi anggota group.
3. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi Dengan adanya platform portal.kkp.go.id dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui portal.kkp.go.id yang setiap pegawai memiliki akses kegiatan tersebut.
4. Optimalisasi penggunaan media daring Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak selalu memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan seperti untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Stasiun PSDKP Pontianak salah satunya melalui zoom meeting.
5. Menerapkan Inovasi Berbasis Platform Digital Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 telah menerapkan inovasi CLBK (Cinta Laut Bersih Kalimantan Barat). Didalam CLBK terdapat layanan konsultasi, pengaduan, forum diskusi dan informasi peraturan kelautan dan perikanan yang dapat diakses masyarakat umum. Inovasi ini memberi dampak pengurangan tugas manual

diganti dengan digitalisasi, peningkatan efisiensi tim sehingga mampu menghemat menit dan dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya. Pekerjaan lebih terukur yaitu sistem online mengurangi kebingungan dan meningkatkan produktifitas dan menghemat biaya operasional seperti mengurangi biaya kebutuhan ruang konsultasi dan penggunaan ATK pertahunnya.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2025 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

Tabel 42. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan IV tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian TW IV							
		Biak	Ambon	Tahuna	Kupang	Tarakan	Cilacap	Pontianak	Belawan
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82	82	82	82	82	82	82	82
2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	95,69
3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	97,50	83,69	97,50	95,00	95,83	92,19	93,00	95,00
4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	81	81	81	81	81	81	81	81
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	81	81	71	81	81	81	81	81
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	89,77	89,50	84,16	89,62	89,66	90,09	89,41	90,83
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	95,35	95,17	95,41	96,37	94,42	97,80	94,58	93,66
14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	87,68	87,72	84,59	82,82	86,73	84,16	86,91	84,89

15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	87,50	88,90	87,60	86,55	86,00	87,95	87,95	87,25
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	91.85	92.95	94.4	86.33	94.64	95.18	93.13
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	87.90	92.50	87.50	80.16	87.83	92.50	92,5	80.81
20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	79,55	78,12	79,73	77,70	74,62	83,77	75,55	81,13
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	82,70	78,94	81,20	78,85	81,20	88.03	77,25	81,37

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 4 mata anggaran kegiatan Tahun 2025, yaitu: ⁽¹⁾ Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; ⁽²⁾ Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾ Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽⁴⁾ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 43. Rincian Realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2025

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	16,559,322,000	14,263,103,996	86.13
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	96,585,000	95,486,115	98.86
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	295,680,000	295,633,032	99.98
4	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	16,142,480,000	15,836,059,980	98,10
Total			33,094,067,000	30,490,283,123	92.13

Sumber : OM-SPAN

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 35.964.014.000**, Sepanjang tahun 2025 DIPA Stasiun PSDKP Pontianak mengalami revisi blokir sehingga menjadi **Rp. 33,094,067,000**. Sampai dengan 31 Desember tahun 2025 berdasarkan **OM-SPAN** Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar **92,13%** atau sebesar **Rp. 30,490,283,123**. Capaian anggaran yang masih cukup optimal yaitu sudah tergolong tinggi yang mana sudah mencapai lebih dari **90%**. Karena sebagian anggaran diblokir sebagai implementasi program Efisiensi anggaran maka realisasi anggran terkesan tidak maksimal dikarenakan pagu awal menjadi pembagi dalam aplikasi OM-SPAN. Tetapi kalau merujuk pada realisasi pagu efektif sudah menunjukkan realisasi yang cukup baik yaitu sebesar yaitu sebesar **99,98%**. Capaian ini tentunya untuk dipertahankan dan dievaluasi dimana titik yang menjadi kelemahan dalam pencapaian kinerja anggaran.

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode Triwulan IV tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan;
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak 21 (dua puluh satu) dan yang dihitung pada Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 21 (dua puluh satu) baik itu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial dengan nilai capaian sasaran **106,47%** dengan kategori **'baik'**;
3. Semua indikator kinerja yang dihitung pada triwulan IV tahun 2025 sebanyak 20 indikator kinerja telah mencapai target sedangkan 1 indikator kinerja tbelum mencapai target yang ditentukan yaitu indikator kinerja Nilai inovasi yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak.
4. Berdasarkan *OM-SPAN* Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar **92,13%** atau sebesar Rp. **30.490.283.123** dari pagu sebesar **Rp. 33.094,067.000**.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2025, maka untuk triwulan dan tahun berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 44. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Capaian indikator kinerja Inovasi	Nilai inovasi belum mencapai target tahun 2025	Capaian nilai inovasi meningkat dan mencapai target pada periode berikutnya	Membahas peningkatan capaian inovasi pada periode berikutnya

5.1 Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Yuniarto Suharto
: Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jabatan : Pontianak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

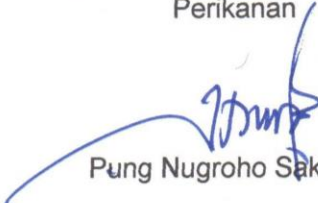
Nama : Pung Nugroho Saksono
: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jabatan :
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2 Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	92
		3 Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	92
3.	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	4 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4.	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		6 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
6.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11 Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	86

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup stasiun psdkp pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	88,5
		19 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	80
		20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Unit)	1
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

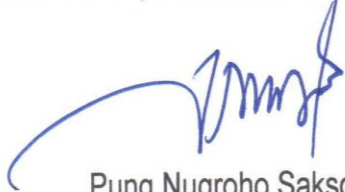
Data Anggaran:

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	17.782.696.000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	16.233.544.000
	b. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	256.615.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	892.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	400.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	18.181.318.000
TOTAL ANGGARAN		35.964.014.000

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto

5.2. Perjanjian Kinerja Revisi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Yuniarto Suharto
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pontianak
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

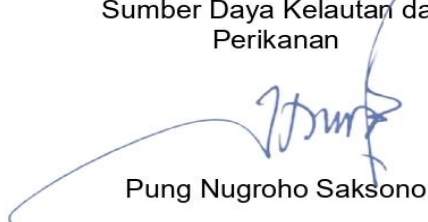
Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92
		3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92
		4	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	100
3.	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100
		6	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100
4.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	82
5.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	82
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
8.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95%
		18 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	80
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	75
		20 Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	77
		21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

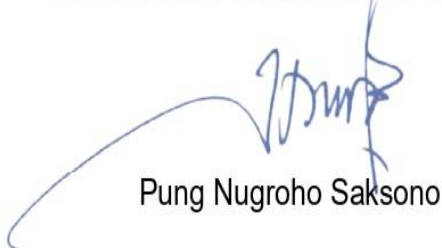
Data Anggaran:

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	16,951,587,000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	16,559,322,000
	b. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	96,585,000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	295,680,000
2.	Program Dukungan Manajemen	16,142,480,000
TOTAL ANGGARAN		33,094,067,000

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak



Bayu Yuniarto Suharto

5.3. Penghargaan Yang Diterima Unit Kerja

